



## KOMUNIKASI BUDAYA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM MENCEGAH KONFLIK KEAGAMAAN DI KOTA BEKASI

Hamluddin<sup>1</sup>, Andi Faisal Bakti<sup>2</sup>

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah<sup>2</sup>  
[hamluddin@ibm.ac.id](mailto:hamluddin@ibm.ac.id)

### ABSTRAK

Komunikasi Budaya MUI Kota Bekasi diharapkan mampu menjangkau seluruh etnis yang mendiami kota dengan luas area 21.000 hektar, di timur Jakarta. Sebagai kota metropolitan, Kota Bekasi dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku, seperti Batak, Melayu, Bugis-Makassar, Dayak, Ambon hingga Papua. Dengan latar belakang masyarakat yang heterogen itu, komunikasi budaya untuk mencegah konflik horizontal menjadi metode yang tepat. Pertanyaan mayor penelitian ini adalah, bagaimana komunikasi budaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi bisa meredam konflik agama di Kota Bekasi? Pertanyaan mayor dijabarkan ke dalam pertanyaan minor di bawah ini, (1) Siapa aktor komunikasi yang mampu meredam konflik horizontal di Kota Bekasi? (2) Seperti apa komunikasi budaya bekerja dalam mendamaikan kelompok masyarakat yang berkonflik? (3) Atas dasar apa komunikasi budaya dapat menjadi resolusi konflik keagamaan? Penelitian ini berasumsi bahwa komunikasi budaya dapat mendamaikan konflik antar umat beragama karena ia menjangkau ruang humanis. Asumsi ini disandarkan aspek sebab-akibat konflik antar pemeluk agama yang diidentifikasi karena faktor egosentris. Konflik paling populer adalah konflik jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di kelurahan Ciketing Asem (2010), konflik gereja Santa Clara, Kecamatan Bekasi Utara (2017). Skala konflik terbuka dengan bukti terjadinya konflik fisik. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *negosiasi identitas* (Stephen Littlejohn; 2017: 79-81) Teori ini mengemukakan bahwa identitas tertentu mempengaruhi interaksi komunikasi. Menggunakan paradigma kritis (*criticism*) sebagai landasan filosofis. Data primer bersumber dari hasil observasi serta wawancara mendalam kepada pimpinan dan pengurus MUI Kota Bekasi. Sedangkan data sekunder merupakan sumber kedua didapatkan dari dokumentasi untuk melengkapi data primer. Riset ini disandarkan pada konsep komunikasi budaya dalam dimensi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan pandangan ulama. Konsep Islam terkait dengan komunikasi budaya adalah kata *tabligh* dalam QS. Al-Maidah (5): 67, kata *ud'u* yang bermakna "serulah" terdapat di dalam QS. An Nahl (16):125, Al Hajj (22): 67, Al Qashas (28): 87, dan Ash Syura (42): 15. Analisis terhadap data dari objek penelitian menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi pengumpulan data, displai data, reduksi data dan verifikasi metode, sumber dan teori. Analisis dilakukan untuk menjawab pertanyaan mayor dan pertanyaan minor penelitian komunikasi budaya dalam dalam meredam konflik agama di Kota Bekasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi konflik cukup tinggi dan terbuka mengingat sentimen negatif terhadap populasi penduduk yang padat seringkali tidak bisa dihindari. Di mana semua kelompok kepentingan dalam hal agama dan kepercayaan menginginkan ruang eksklusif dalam beribadah. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa komunikasi budaya membuka ruang dialog untuk meredakan konflik agama di Kota Bekasi. Konflik bersumber dari dua hal, *pertama*, dari dalam kelompok agama yang ingin dominan terhadap kelompok agama lain. *Kedua*, intervensi luar yang menginginkan konflik agama terjadi. Kedua faktor tersebut sulit diidentifikasi karena aktornya tersembunyi.

**Kata Kunci:** Komunikasi budaya, konflik agama, *tabligh*, *ud'u*



## ABSTRACT

*It is hoped that the Cultural Communication of the Bekasi City MUI will be able to reach all ethnic groups residing in the city, which covers an area of 21,000 hectares, east of Jakarta. As a metropolitan city, Bekasi is home to people from various ethnic groups, such as Batak, Malay, Bugis-Makassar, Dayak, Ambon, and even Papua. Given the heterogeneous background of the society, cultural communication to prevent horizontal conflict is an appropriate method. The main research question of this study is, how can the cultural communication of the Indonesian Ulema Council (MUI) in Bekasi City mitigate religious conflict in Bekasi City? The major question is broken down into the minor questions below: (1) Who are the communication actors capable of mitigating horizontal conflict in Bekasi City? (2) How does cultural communication work in reconciling conflicting groups of people? (3) On what basis can cultural communication be a resolution to religious conflict? This research assumes that cultural communication can reconcile interreligious conflicts because it reaches the humanistic realm. This assumption is based on the cause-and-effect aspect of conflict between religious adherents, which is identified as being due to egocentric factors. The most popular conflicts are the congregation conflicts of the Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Church in Ciketing Asem village (2010), and the Santa Clara Church conflict in North Bekasi District. (2017). Open conflict scale with evidence of physical conflict. This research was conducted qualitatively using a case study approach. The theory used in this research is identity negotiation theory. (Stephen Littlejohn; 2017: 79-81) This theory proposes that certain identities influence communication interactions. Using a critical paradigm as a philosophical foundation. Primary data was sourced from the results of observations and in-depth interviews with the leadership and management of the Bekasi City MUI. Meanwhile, secondary data is the second source obtained from documentation to supplement the primary data. This research is based on the concept of cultural communication within the Islamic dimension, drawing from the Quran, Hadith, and the views of scholars. The Islamic concept related to cultural communication is the word *tabligh* in Surah Al-Maidah (5): 67, and the word *ud'u*, which means "call," is found in Surah An Nahl (16):125, Al Hajj (22): 67, Al Qashas (28): 87, and Ash Syura (42): 15. Analysis of data from the research object using the Miles and Huberman model includes data collection, data display, data reduction, and verification of methods, sources, and theory. The analysis was conducted to answer the major and minor research questions regarding cultural communication in mitigating religious conflict in Bekasi City. The analysis results indicate that the potential for conflict is quite high and open, considering that negative sentiment toward densely populated areas is often unavoidable. Where all interest groups in terms of religion and belief want exclusive space for worship. The research conclusion states that cultural communication opens a space for dialog to ease religious conflict in Bekasi City. Conflict stems from two things: first, from within religious groups that want to dominate other religious groups. Second, external interventions that desire religious conflict to occur. Both factors are difficult to identify because the actors are hidden.*

**Keywords:** *Cultural communication, religious conflict, tabligh, ud'u*

## PENDAHULUAN

Komunikasi budaya MUI Kota Bekasi diharapkan mampu meredam konflik antar pemeluk agama di Kota Bekasi, yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang. Konflik yang membekas dalam ingatan publik adalah konflik antar



pemeluk agama dalam persoalan pembangunan gereja. Dua peristiwa tersebut konflik yang masih ada dalam ingatan publik hingga saat ini adalah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di kelurahan Ciketing Asem (2010), konflik gereja Santa Clara, Kecamatan Bekasi Utara (2017). Konflik fisik dan terbuka itu melibatkan beberapa organisasi keagamaan Islam dengan jemaat gereja (*Tempo.*, 2010).

Meski telah berlalu, namun potensi konflik masih terbuka karena ingatan tentang penolakan pembangunan gereja masih membekas dalam hati dan ingatan warga non-Islam dan Muslim. Dengan demikian, sentimen negatif antar kedua kelompok agama masih ada. Selain dua peristiwa tersebut, terdapat konflik lainnya pendirian Gereja Galilea Galaxi, dan Peristiwa pembangunan gereja Kalibaru. Studi konflik keagamaan di Kota Bekasi telah dilakukan sejumlah akademisi dengan pendekatan studi kasus. Sejumlah peneliti menyatakan bahwa potensi konflik masih terbuka (Priyanda V.M. dkk., 2013).

Hasil riset terhadap konflik keagamaan di Kota Bekasi merekomendasikan sejumlah solusi atas permasalahan yang terjadi, di antaranya, penguatan fungsi deteksi dini potensi konflik, pencegahan konflik, dan rehabilitasi konflik. Namun rekomendasi yang bersifat normatif itu sulit dijalankan karena masalah mendasar bukan pada peristiwa konfliknya, tetapi lebih mendasar pada konflik moral (Littlejohn dkk., 2017). Karakteristik masyarakat dengan latar belakang suku dan budaya yang komunal salah satu penyebab eskalasi konflik meluas dan berlangsung dalam waktu lama.

Walikota dan wakil wali kota Bekasi ketika itu, Mochtar Mohamad dan Rahmat Effendi, meminta kedua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menahan diri. Masyarakat Muslim diminta untuk percaya kepada pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tersebut, begitu juga kepada jemaat gereja agar menahan diri tidak memaksakan pembangunan gereja di lokasi di mana penduduknya mayoritas muslim agar perselisihan tidak terulang. Semua persoalan dapat diselesaikan dengan pendekatan resolusi yang tepat dan melibatkan aktor-aktor kunci penyelesaian konflik yang tepat pula. Setiap langkah dalam menyelesaikan konflik harus terencana, sistematis, dan terukur dengan baik sehingga tercapai hasil yang baik, yaitu mewujudkan tatanan sosial-masyarakat yang mengedepankan kerukunan antar umat beragama.

Optimalisasi peran stakeholders pembangunan, meliputi Kepala Daerah dan seluruh unsur kelembagaannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), organisasi ke masyarakat, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi dapat mendorong penguatan resolusi konflik horizontal. Sebagai perwakilan masyarakat dalam lembaga pemerintah, pimpinan dan pengurus MUI dapat menjadi aktor kunci keberhasilan upaya damai antara pihak-pihak yang berkonflik, atau mencegah terjadinya konflik dengan deteksi dini.

Optimalisasi peran MUI dapat semakin kuat karena eksistensinya di dalam kelembagaan sangat kuat dalam lingkup sosial maupun budaya. Secara struktur, MUI terlibat dalam pengambilan kebijakan yang bersifat strategis yang diimplementasikan ke dalam bentuk peraturan daerah, dan secara budaya MUI dapat melakukan persuasi langsung kepada para aktor konflik. Solusi atas permasalahan konflik yang telah dilakukan antara lain, melakukan identifikasi potensi konflik melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berkala.



Namun pelaksanaan program strategis ini tidak optimal karena pelibatan stakeholders sangat terbatas, hanya melibatkan unsur pimpinan daerah meliputi eksekutif dan legislatif.

Musyawarah yang ditujukan untuk menjaring aspirasi masyarakat atas seluruh permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Karenanya, pola penjangkauan aspirasi normatif yang selama ini dijalankan dengan model dari atas ke bawah (*top to down*) harus diubah karena tidak memberikan ruang interaksi bagi masyarakat, apalagi ruang partisipasi aktif. Dengan model tersebut, pemerintah daerah bertumpu pada kemampuan perencanaan (*agenda setting*), dalam memberikan instruksi kepada masyarakat.

Pola tersebut disadari tidak lagi efektif, meski tetap menggunakan kerangka kerja *agenda setting*, tetapi pemerintah daerah mengelaborasi partisipasi masyarakat dengan melibatkan mereka sebagai pemberi informasi atas permasalahan di lapangan, mengakomodir masukan dan aspirasi ke dalam program pembangunan dan melibatkan media sebagai saluran informasi (Yuniarti dkk., 2018).

Fungsi lain Musrenbang, menjadi wadah mendiskusikan berbagai persoalan sosial yang sedang terjadi di masyarakat. MUI sebagai organisasi berbasis keagamaan sekaligus organisasi sosial-kemasyarakatan, memiliki akses penuh dalam upaya penyelesaian konflik horizontal yang terjadi. Meski didirikan sebagai organisasi Muslim, namun MUI menjalankan fungsi perekat umat melalui pendidikan keagamaan, sosial-kemasyarakatan, dan penguatan sistem kebudayaan.

MUI dapat berperan dalam upaya akulturasi budaya pada masyarakat dengan karakteristik heterogen. Akulturasi budaya merupakan gerakan humanis yang mampu melunturkan egosentris dan sektarian kewilayahan. Karena masyarakat Kota Bekasi majemuk, sikap saling menghargai terhadap budaya lain harus terus dikampanyekan agar tatanan sosial berjalan baik.

Penelitian ini menjawab pertanyaan, bagaimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi meredam konflik keagamaan di Kota Bekasi? Riset ini dilakukan dengan studi kualitatif dalam pendekatan studi kasus. Fokus penelitian pada kegiatan dakwa sosial yang dilaksanakan MUI sebagai upaya menyatukan warga dalam sistem sosial yang saling menghargai dan menghormati keragaman agama, kepercayaan, dan budaya (Hamluddin., Bakti, Andi Faisal., 2024).

## TINJAUAN PUSTAKA

### a. Konsep Kata *ad-Din*

Kata *ad-Din* memiliki beberapa makna di dalam Al-Qur'an, di antaranya bermakna agama seperti terdapat di dalam Surah *Al-Kafirun* (109): 6 yang tertulis *لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين*. Konsep *ad-Din* alami perdebatan panjang dengan dua poros pendapat. *Pertama*, pendapat yang menginginkan agama sebagai nilai yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek ibadah maupun aspek duniawi (sosial, politik, ekonomi). *Kedua*, pendapat yang menolak menyatukan agama dan negara dalam bentuk hukum positif (Prayetno, Budi., 2017). Bagi Hidayatullah dan Republika, agama melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk urusan informasi.

Pandangan konservatif tentang integrasi nilai-nilai Islam kedalam informasi ini dikuatkan oleh tafsir lain terhadap makna kata *ad-Din* yang juga dimaknai hari pembalasan dan hari kiamat. Makna ini diterangkan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an di

antaranya” Surah Al-Fatihah (1): 4 (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ); An-Nuur (24): 25 (يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمْ ( وَإِنَّ عَلَيْكَ اللُّغَةَ الِى ) ; Al-Hijr: 35 (الكَيْسِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ( يَوْمِ الدِّينِ); dan juga hadits dari Ibnu Majah ( وَمَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ). Dalam kerangka operasional, peneliti menggunakan kata *ad-Din* yang bermakna agama dalam perspektif ideologi dan sejarah peradaban manusia yang menyertainya. Adapun *ad-Din* yang memiliki makna kedua sebagai hari pembalasan dan hari kiamat, menjadi dasar pemahaman bahwa informasi lisan dan tulisan memiliki konsekuensi atas pertanggungjawab pahala dan dosa.

#### b. *Tabligh dan Ud'u*

Konsep *tabligh* menurut Quraish Shihab, *tabligh* adalah kewajiban menyampaikan ajaran agama yakni petunjuk dari Allah diturunkan kepada ahli kitab tanpa menghiraukan kritik dan ancaman mereka yang disertai dengan jaminan keamanan Nabi Muhammad SAW (Shihab, M. Quraish., 2005).

وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

“Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya”, QS. Al-Maidah (5):67.

Konsep ini menekankan bahwa setiap muslim adalah da'i yang senantiasa mengajak kepada kebaikan (*maslahah*), bukan keburukan (*mafsadat*). Komparasi terhadap teori yang digunakan menunjukkan bahwa kegiatan *tabligh* dalam Islam merupakan kegiatan terstruktur, terlembaga sehingga dampaknya bisa lebih luas.

Adapun kata *ud'u* dalam Al-Qur'an, merujuk kepada beberapa ayat, di antaranya: QS. An Nahl (16):125, Al Hajj (22): 67, Al Qashas (28): 87, dan Ash Syura (42): 15. Seperti bunyi surat QS. An Nahl (16):125, di bawah ini:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik”

MUI Kota Bekasi sebagai organisasi keagamaan dapat melakukan komunikasi budaya dengan mengajak kepada kebaikan. Materi ajakan tidak hanya seputar akidah Islam, tetapi juga mengajak kepada kesalehan sosial, untuk peduli kepada sesama manusia dan lingkungan sekitar.

Sejumlah konsep di atas menunjukkan bahwa organisasi kelompok muslim memiliki kewajiban menjadi pengarah sekaligus perekat umat. Apa yang bisa dilakukan MUI sebagai perekat umat? Jawaban atas pertanyaan ini merepleksikan peran dan fungsi MUI sendiri sebagai organisasi keagamaan dan juga organisasi sosial. Sebagai organisasi keagamaan, MUI memiliki kewajiban memberikan pendidikan keumatan, upaya saling menghargai kepada anggotanya dan juga masyarakat muslim seluruhnya. Sementara fungsi sosial, MUI dapat menjadi inisiator dalam kegiatan dialog antar umat untuk menekan potensi konflik sosial yang terjadi di level masyarakat. Konsep yang juga dapat digunakan dalam pendekatan konflik keagamaan adalah *al-ummah*. Dalam sejumlah pemikiran politik Islam disebut dengan istilah *tabanni mashâlih al-ummah* (TMU) yang secara harfiah dimaknai kemaslahatan-kemaslahatan umat. Dengan TMU, organisasi Islam mengangkat kemaslahatan yang menjadi hak masyarakat yang tidak mereka rasakan, atau hak yang dirampas pihak lain khususnya penguasa (Kurnia, MR., 2005).



Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang sedang berlangsung. Adapun sifatnya bisa parsial yang berkaitan dengan masalah tertentu seperti pendirian rumah ibadah dan hak beribadah, harga BBM, Pendidikan sekuler dan kapital, diintegrasikan, intervensi asing, hutang luar negeri, harga bahan pokok, dan masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Kemaslahatan bisa juga bersifat global; masalah kelompok masyarakat tertentu seperti seulitnya pedangan kaki lima (PKL) berjualan; atau hal-hal yang terkait perampasan hak masyarakat pada umumnya seperti konflik agraria akibat pengembangan area industri dan pertambangan (Kurnia, MR., 2005).

### c. Teori Negosiasi

Teori negosiasi institusi ini membahas bagaimana tindakan institusi masyarakat (seperti media) dihubungkan dengan, memproduksi, dan mereproduksi budaya. Misalnya masyarakat menonton televisi setiap hari, sehingga menjadikannya bagian dari budaya televisi. Seluruh industri televisi juga merupakan produksi budaya karena merupakan sarana untuk menciptakan, memperdebatkan, mereproduksi, dan mengubah budaya. Praktik konkret atau material yang terlibat dalam produksi dan konsumsi televisi merupakan mekanisme penting dalam pembentukan ideologi.

Teori di atas digunakan oleh peneliti sebagai panduan dalam melihat fenomena konflik sosial-keagamaan di Kota Bekasi. Meski konfliknya telah mereda, tetapi potensi konflik masih ada karena pola penanganan yang dilakukan oleh sejumlah stakeholder termasuk MUI Kota Bekasi, masih dalam batasan kasus-per kasus sehingga tidak menyentuh permasalahan secara holistik. Salah satu sebabnya adalah, optimalisasi peran tokoh agama dan tokoh masyarakat belum dilakukan dengan baik. Selain itu, perbincangan tentang konflik keagamaan belum pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Paradigma**

Penelitian ini merupakan kajian di wilayah interdisipliner yang mencoba untuk mengintegrasikan Ilmu Komunikasi yang dilakukan pada kajian-kajian tradisi Islam dengan disiplin Ilmu Komunikasi. Paradigma yang digunakan adalah paradigma kritis yang berangkat dari pandangan ahli tentang teori kritis yang memandang bahwa kontradiksi, tekanan, bahkan konflik merupakan aspek yang tidak dapat dihindari dari aturan sosial.

Teori kritis bersandar pada pemikiran Marxis, yang menggolongkan teori kritis dengan identifikasi terhadap aktual sosial yang menentukan atau menyebabkan, dominasi dan menjadikannya tekanan. Wacana adalah argumen sistematis yang membuat beberapa pertimbangan guna menunjukkan validitas dari suatu klaim. Kebenaran hanya dapat dibuktikan dengan wacana teoritis yang menekankan bukti.



Ketika terjadi perdebatan pada masalah ketepatan, maka digunakanlah wacana praktek. Wacana ini menekankan norma. Aliran kritis ini memandang bahwa sifat pengetahuan berada dalam perdebatan sampai mendapat persetujuan (Littlejohn dkk., 2017)

### **Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan riset kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). Kemudian, sesuai dengan sumber datanya maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) (Bogdan & Robert., 1993). Hasil data dari penelitian lapangan adalah gagasan, pemikiran, kritik, saran. Peran seorang peneliti adalah untuk menginterpretasikan secara kritis suatu fenomena dan perilaku individu dan kelompok sebagai subjek penelitian. Kemudian, sesuai dengan tujuan penelitian ini, bentuk penyajian hasil pengolahan data adalah deskriptif analisis. Karenanya penelitian ini mendeskripsikan secara kritis terkait fenomena yang terjadi di lapangan (Bogdan & Robert., 1993).

Pendekatan studi kasus berpusat pada lima langkah ilmiah. *Pertama*, menyiapkan instrumen penelitian yang umumnya dilakukan dengan penyusunan matriks indikator pengukuran terhadap masalah yang diteliti, seperti indikator resiko, sosio-budaya pemilih, sosio-ekonomi, dan indikator lingkungan yang mempengaruhi objek penelitian. *Kedua*, memiliki banyak informasi mengenai objek dan subjek penelitian. *Ketiga*, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya karena kekayaan data menjadi cerminan bahwa penelitian dilakukan secara mendalam. *Keempat*, menganalisa data secara holistik dan mampu memilah serta memilah di antara banyaknya data tersebut yang akan digunakan. *Kelima*, pengambilan kesimpulan dengan baik (Yin, K. Robert., 2014).

### **Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kritis. Penyelidik kualitatif menggunakan teori sebagai pisau analisis untuk memahami persoalan yang diteliti dengan beberapa cara (Creswell, 2014). *Pertama*, seperti halnya penelitian kuantitatif, penelitian ini digunakan sebagai penjelasan luas mengenai perilaku dan sikap, dan mungkin lengkap dengan variabel, konstruksi, dan hipotesis. Misalnya, para etnografer menggunakan tema atau aspek budaya untuk dipelajari dalam proyek kualitatif mereka, seperti kontrol sosial, bahasa, stabilitas dan perubahan, atau organisasi sosial, seperti kekerabatan atau keluarga.

Tema dalam konteks ini memberikan serangkaian hipotesis yang siap pakai untuk diuji dari literatur. Meskipun para peneliti mungkin tidak menyebutnya sebagai teori, para peneliti memberikan penjelasan luas yang digunakan para antropolog untuk mempelajari perilaku dan sikap masyarakat dari berbagai budaya.



*Kedua*, para peneliti semakin banyak menggunakan lensa atau perspektif teoretis dalam penelitian kualitatif, yang memberikan lensa orientasi keseluruhan untuk mempelajari pertanyaan-pertanyaan tentang gender, kelas, dan ras (atau isu- isu lain tentang kelompok marginal). Lensa ini menjadi perspektif transformatif yang membentuk jenis pertanyaan yang diajukan, memberikan informasi bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis, serta memberikan ajakan untuk bertindak atau melakukan perubahan. Penelitian kualitatif pada tahun 1980-an mengalami transformasi untuk memperluas cakupan penelitiannya dengan memasukkan lensa teoretis ini.

Pendekatan ini memandu para peneliti mengenai isu- isu apa yang penting untuk dikaji (misalnya, marginalisasi, pemberdayaan, penindasan, kekuasaan) dan orang-orang yang perlu diteliti (misalnya perempuan, status sosial ekonomi rendah, kelompok etnis dan ras, orientasi seksual, disabilitas). Hal ini juga menunjukkan bagaimana peneliti memosisikan dirinya dalam penelitian kualitatif (misalnya, di depan atau bias dari konteks pribadi, budaya, dan sejarah) dan bagaimana laporan akhir tertulis perlu ditulis tanpa meminggirkan individu lebih lanjut, dengan berkolaborasi dengan peserta untuk membuat rekomendasi perubahan untuk meningkatkan kehidupan dan masyarakat (Creswell dkk., 2018).

### **Teknik pengumpulan data**

Data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi (Miles & Huberman, 200M). Observasi dilakukan terhadap pimpinan dan pengurus MUI Kota Bekasi yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria, meliputi: pengalaman sebagai pengurus partai, mengetahui dan memahami konflik keagamaan yang terjadi di Kota Bekasi. Untuk melengkapi perolehan data, peneliti melakukan wawancara mendalam terkait tema penelitian. Studi dokumentasi menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam melihat catatan-catatan peristiwa pada masa lalu, untuk kemudian diolah sebagai data inti dari penelitian.

### **Teknik analisa data**

Miles dan Huberman menjelaskan teknik analisa data kualitatif dilakukan dengan *flow model* dengan tiga tahapan utama, yaitu displai data, reduksi data, dan membuat kesimpulan (Miles & Huberman, 200M). Displai data merupakan proses seleksi data, memfokuskan data, menyederhanakan data, mengabstraksi data, dan transkripsi data. Langkah ini umumnya dilakukan dengan membuat tabulasi data berdasarkan klasifikasi tertentu. Reduksi data meliputi kegiatan mengorganisasikan data sehingga terbentuk kumpulan informasi yang terkompresi dan memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan dan tindakan lanjutan. Adapun membuat kesimpulan berisi kegiatan-kegiatan yang memverifikasi proses analisis, mempertentangkan argumentasi dan melakukan elaborasi terhadap temuan-temuan peneliti lain sehingga dapat digunakan sebagai validitas analisis (Sugiyono., 2013).



Selanjutnya, *flow model* tersebut dapat diperinci menjadi beberapa tahapan, yaitu data yang ada diidentifikasi, diklasifikasi dan dikategorisasi dengan cara membandingkan antara satu data dengan data lainnya, lalu melakukan analisis data hingga menarik kesimpulan. Identifikasi data dalam penelitian ini dilakukan untuk menghimpun informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan wawancara mendalam, dan mendokumentasikan data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian.

Klasifikasi data ditujukan untuk mengelompokkan data atas dasar persamaan dan perbedaannya, serta tingkat kegunaan data berdasarkan beberapa unsur, misalnya unsur penting, unsur mendukung, diperlukan atau data yang tidak diperlukan. Kegiatan membandingkan data dilakukan agar peneliti memperoleh informasi yang bersifat komprehensif tentang kelebihan dan kelemahan suatu data. Data yang telah disusun secara sistematis kemudian diidentifikasi, diklasifikasi, dan dilakukan komparasi berdasarkan jenisnya. Terhadap data yang tidak diperlukan, peneliti dapat menyimpannya pada tabulasi tersendiri yang bisa dipergunakan untuk keperluan penelitian lainnya.

Langkah berikutnya adalah, peneliti mendeskripsikan data yang telah diperoleh dan telah disusun berdasarkan jenisnya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan menjadi suatu pemahaman. Setelah semua kegiatan tersebut dilakukan, maka peneliti melakukan pengecekan ulang untuk menelusuri dan memastikan kesahihan data. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari penelitian ini. Bagian ini merupakan pekerjaan tersulit bagi peneliti, karena dalam studi kualitatif terutama pada pendekatan studi kasus tidak ada format baku dalam penarikan kesimpulan. Peneliti hanya memiliki rambu-rambu bahwa ia bekerja memformulasikan yang baik.

## **PEMBAHASAN**

Teori negosiasi institusi ini membahas bagaimana tindakan institusi masyarakat (seperti media) dihubungkan dengan, memproduksi, dan mereproduksi budaya. Misalnya masyarakat menonton televisi setiap hari, sehingga menjadikannya bagian dari budaya televisi. Seluruh industri televisi juga merupakan produksi budaya karena merupakan sarana untuk menciptakan, memperdebatkan, mereproduksi, dan mengubah budaya. Praktik konkret atau material yang terlibat dalam produksi dan konsumsi televisi merupakan mekanisme penting dalam pembentukan ideologi.

Oleh karena itu, para sarjana kajian budaya tertarik pada hubungan antara komponen- komponen kebudayaan yang berbeda dan bagaimana komponen- komponen tersebut bersinggungan dan berinteraksi dengan berbagai proses sejarah dan sosial. Kritikus budaya mungkin mengkaji bagaimana artefak atau praktik budaya tertentu, program televisi, lagu, acara olah raga diposisikan terhadap serangkaian wacana sejarah yang saling bersilangan untuk lebih memahami serangkaian praktik budaya. Dengan demikian, kajian budaya umumnya lebih cocok dengan tradisi post-modern karena



perhatiannya terhadap cara budaya diproduksi, direproduksi, dan diubah melalui bahasa dan bentuk simbolik.

Kelompok pakar budaya yang paling terkenal, British Cultural Studies, berafiliasi dengan Pusat Studi Budaya Kontemporer (CCCS) di Universitas Birmingham. Asal usul tradisi ini biasanya ditelusuri ke tulisan Richard Hoggart dan Raymond Williams pada tahun 1950-an; Sebagai intelektual kelas pekerja, mereka memilih untuk fokus pada “budaya populer” yang berbeda dengan posisi intelektual elitis yang mereka temui di akademi. 20 Nama yang paling banyak diasosiasikan dengan studi budaya kontemporer adalah Stuart Hall, yang menjabat sebagai direktur CCCS pada tahun 1969 Hall dianggap berjasa atas peralihan dari studi budaya populer secara umum ke fokus pada media, khususnya fungsi dan efek media.

Berdasarkan Marx, titik awal kajian media dari perspektif kajian budaya adalah struktur kepemilikan, pengaruh, dan kendali media; berdasarkan informasi ini, sifat sebagian besar konten media dapat ditentukan serta kemungkinan dampak media terhadap khalayaknya. Fokus ini kini telah diperluas secara signifikan – ada lebih banyak hal yang berkaitan dengan media daripada persoalan ekonomi.<sup>22</sup> Persoalan keterwakilan di media, janji- janji dan biaya teknologi yang dimediasi, dan perbedaan peran yang dimainkan khalayak dalam hubungannya dengan media adalah hal- hal yang perlu diperhatikan.

Alih- alih mereduksi segalanya pada bidang ekonomi, artikulasi mengkaji bagaimana berbagai elemen – ekonomi, media, ras, kelas, properti – terlibat dalam menentukan sifat budaya. Namun, semua keterkaitan adalah bagian dari struktur yang lebih besar, sehingga bentuk artikulasi lain yang menarik bagi para sarjana kajian budaya adalah cara ideologi memaksa individu dan kelompok untuk membayangkan diri mereka sebagai anggota kelompok tertentu, berbagi nilai- nilai dan tujuan kelompok tersebut.

Identitas budaya dan etnis dicirikan oleh dua dimensi: isi nilai dan arti- penting. Isi nilai terdiri dari jenis evaluasi yang Anda buat berdasarkan keyakinan budaya. Misalnya saja, beberapa budaya cenderung menempatkan anggotanya untuk lebih menghargai komunitas atau kelompok daripada individu, sementara budaya lain mengistimewakan nilai- nilai individualistis. Salience adalah kekuatan afiliasi yang kita rasakan dengan kelompok tertentu dalam situasi tertentu. Anda mungkin memiliki ikatan budaya dan/ atau etnis yang sangat kuat, atau Anda mungkin hanya memiliki perasaan berafiliasi yang lemah. Bagian dari identitas Anda — siapa Anda sebagai pribadi ditentukan oleh seberapa kuat Anda terhubung dengan kelompok yang lebih besar di mana Anda menjadi bagiannya dan kejelasan nilai- nilai yang muncul dari hubungan tersebut.

Ting- Toomey secara khusus tertarik pada bagaimana individu mengelola atau menegosiasikan ketegangan antara diri pribadi dan budaya dengan cara yang meningkatkan rasa hormat dan pertimbangan terhadap kelompok budaya lain. Ia menyarankan agar semua orang mencari keamanan identitas, inklusi, koneksi, dan kontinuitas, namun hal ini tidak selalu mudah diwujudkan. Tingkat nilai dan arti- penting yang tinggi dalam kaitannya dengan suatu kelompok budaya dapat menimbulkan rasa aman yang berlebihan dan dengan demikian menimbulkan perasaan



etnosentrisme — keyakinan bahwa kelompok budaya Anda adalah yang terbaik (dibahas secara lebih rinci di Bab 11). Ketidak samaan emosional yang berlebihan dapat membuat Anda memandang kelompok budaya lain terlalu berbeda atau asing dari Anda sehingga tidak dapat dipercaya. Kebanyakan dari kita bekerja melalui negosiasi identitas

Kompetensi antarbudaya terdiri dari tiga komponen- pengetahuan identitas, perhatian, dan keterampilan negosiasi. Pengetahuan identitas adalah pemahaman tentang pentingnya identitas budaya/etnis dan kemampuan untuk melihat pentingnya identitas tersebut bagi orang lain. Artinya mengetahui sesuatu tentang identitas budaya dan mampu melihat perbedaan, misalnya antara identitas kolektivis dan individualis. Perhatian berarti menjadi sadar secara kebiasaan dan hati-hati. Artinya kesiapan untuk beralih ke perspektif baru. Terakhir, keterampilan negosiasi mengacu pada kemampuan untuk menegosiasikan identitas melalui pengamatan yang cermat, mendengarkan, empati, kepekaan nonverbal, kesopanan, penyusunan ulang, dan kolaborasi. Anda tahu apakah Anda telah mencapai negosiasi identitas yang efektif jika kedua belah pihak merasa dipahami, dihormati, dan dihargai.

Teori di atas digunakan oleh peneliti sebagai panduan dalam melihat fenomena konflik sosial-keagamaan di Kota Bekasi. Meski konfliknya telah mereda, tetapi potensi konflik masih ada karena pola penanganan yang dilakukan oleh sejumlah stakeholder termasuk MUI Kota Bekasi, masih dalam batasan kasus-per kasus sehingga tidak menyentuh permasalahan secara holistik. Salah satu sebabnya adalah, optimalisasi peran tokoh agama dan tokoh masyarakat belum dilakukan dengan baik. Selain itu, perbincangan tentang konflik keagamaan belum pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi

Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ini menemukan sejumlah fakta bahwa, (1) MUI sebagai organisasi keagamaan belum optimal dalam menjalankan komunikasi budaya untuk mendamaikan umat; (2) Forum pertemuan antar-umat belum dilaksanakan secara konsisten, hanya sebatas ketika terjadi konflik; (3) Fungsi *tabligh* atau mengajak kepada kebaikan masih terbatas di lingkungan masyarakat muslim saja; (4) Pelibatan tokoh agama dalam forum dialog antar umat beragama belum berjalan.

Meski tidak bersentuhan langsung dengan kelompok keagamaan lainnya, tetapi MUI dapat terlibat secara aktif berdasarkan fungsinya dalam memberikan layanan keagamaan kepada umat Islam. Peran ini akan memberikan pendidikan terutama dalam hal karakter ke-Islaman untuk menghindarkan diri dari perselisihan dan perpecahan umat. Sejalan dengan itu, peran MUI Kota Bekasi akan mendorong peningkatan prinsip *Tabligh dan Ud'u*. Prinsip *ta'awun* akan berdampak pada konstruksi sosial yang baik di mana setiap individu yang tergabung ke dalam kelompok masyarakat akan saling membantu satu sama lain (QS.30:21., QS.5:2., QS.7:156).

*Tabligh dan Ud'u* memiliki makna yang sama mengajak kepada kebaikan membangun kesalehan sosial yang dapat ditanamkan kepada setiap individu sejak usia dini (Sapura, Teguh., 2022). Konsep ini dalam pandangan Barat dikenal dengan kata



“infak” yang bertujuan membangun kebersamaan antar umat. Dalam bidang komunikasi Islam, infak ditekankan dalam sejumlah ayat tentang sedekah untuk mewujudkan dua hal, yakni: penguatan ideologi, dan penguatan kebersamaan atau kesalehan sosial (Saputra, Teguh., 2022).

Dalam konsep ini, MUI Kota Bekasi secara aktif melaksanakan kegiatan tersebut kepada beberapa masyarakat sasaran. *Pertama*, berinjak kepada para da'i yang menjalankan fungsi *tabligh* di 12 kecamatan di Kota Bekasi, donasi diberikan dalam bentuk biaya hidup dan bahan pokok. Ketua MUI Kota Bekasi, KH. Mi'ran Syamsuri menyampaikan bahwa kegiatan filantropi untuk menguatkan sendi-sendi keumatan melalui bantuan yang sifatnya berkala. Melalui kegiatan tersebut, MUI berharap ketahanan umat terjaga, baik dalam hal ideologi maupun kesalehan sosial berkat peran pada da'i yang sehari-harinya membersamai masyarakat.

*Kedua*, kesalehan sosial ditingkatkan kepada warga mu'alaf atau yang baru masuk Islam. Selain pemberian bantuan, MUI juga melaksanakan kegiatan pendampingan untuk memenuhi kebutuhan terhadap pendidikan Islam-nya. Pada tanggal 9-10 Desember 2023, MUI menyelenggarakan kegiatan Diklat Da'i dan Mualaf Kota Bekasi, sebagai kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk masyarakat sasaran. Dari kegiatan tersebut, MUI berharap cita-cita menguatkan iman Islam pada masyarakat tersalurkan dengan baik.

Ketua panitia Diklat dari Lembaga Khusus MUI Kota Bekasi, Epen Supendi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sebagai respons terhadap keadaan masyarakat di tengah arus globalisasi teknologi informasi. Diklat Da'i dilaksanakan untuk penguatan tugas dan fungsi MUI Kota Bekasi, agar mereka terlibat langsung dalam menangani masalah yang terjadi di masyarakat. Adapun kepada para mu'alaf, diklat merupakan usaha untuk menjaga para mualaf tetap konsisten dalam keimanannya. Kepada para mu'alaf, MUI memberikan pendampingan khusus dan juga bantuan sosial.

Infak bisa dilakukan dalam bentuk apapun yang pada intinya menyalurkan kebaikan kepada orang lain. Pada masa covid-19 mewabah di Indonesia, MUI aktif berinjak kepada masyarakat dari semua golongan dengan terlibat dalam kegiatan infak bahan pokok seperti beras kepada masyarakat. Infak beras dilaksanakan hasil kerjasama dengan organisasi filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada tahun 2019 lalu.

Prinsip *tabligh*, sebagaimana tugas utama dari Kenabian Muhammad SAW, bahwa Ia diturunkan ke bumi sebagai rahmat bagi alam semesta. Tugas ini melekat kepada semua umat Islam, untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat dengan menjadi rahmat bagi sesama manusia dan lingkungannya.

Dalam setiap kegiatan yang bersentuhan dengan aktivitas sosial-kemasyarakatan, MUI hadir sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan pimpinan daerah, MUI secara aktif memberikan masukan/solusi atas permasalahan yang terjadi



meski tidak terlibat sebagai aktor utama. Hal ini disampaikan oleh Zulkarnain Alfisyahrin, Sekretaris MUI Kota Bekasi, bahwa dalam setiap permasalahan sosial yang terjadi di Kota Bekasi, MUI selalu hadir atas permintaan kepala daerah atau stakeholders lainnya.

Adapun prinsip *ud'u*, adalah prinsip menjaga ukhuwah dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tujuan utama dari persatuan ini adalah terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, yaitu kemaslahatan yang sedang berlangsung. Adapun sifatnya bisa parsial yang berkaitan dengan masalah tertentu seperti pendirian rumah ibadah dan hak beribadah.

Tujuan *ud'u* adalah membangun umat yang terbaik (*khairu ummah*), dengan ajakan lisan maupun pemberian contoh. Sebagai tokoh agama yang menjalankan organisasi MUI, para pimpinan dan pengurusnya harus mampu menunjukkan sikap tauladan di tengah-tengah masyarakat. Penguatan pendidikan agama melalui lisan dan contoh ini yang belum optimal menjangkau masyarakat di luar Islam.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut :

1. Refleksi atas makalah ini meliputi empat hal, yaitu: (1) Komunikasi budaya akan meredam konflik agama jika dilakukan dengan menjangkau semua umat; (2) Fungsi *tabligh* harus diperluas ke semua wilayah di Kota Bekasi dengan melibatkan da'I; (3) Aspek kebudayaan merupakan satu dimensi penting dalam melihat efektivitas informasi, apakah mampu mendorong kemaslahatan atau tidak; (4) Peran para da'i menjadi penting untuk hadir di semua lapisan masyarakat.
2. Implikasi dari perselisihan antar kelompok keagamaan mengakibatkan terjadinya disorientasi pembangunan di Kota Bekasi. Hubungan antara masyarakat akan mengalami degradasi karena umat berada pada dua arus konflik horizontal terbuka, daya dukung sesama warga menurun dan cenderung saling melenyapkan.

Penelitian ini mencatat empat poin refleksi atas masalah yang terjadi, meliputi: Upaya mendamaikan antar umat beragama membutuhkan kerja keras dengan melibatkan seluruh tokoh agama; (2) Konflik, jika tidak dicegah akan berlangsung dalam waktu lama dan sulit dilupakan; (3) Implikasi dari riset ini berguna untuk mengintegrasikan nilai budaya masyarakat ke dalam ilmu komunikasi; Hal ini berimplikasi pada peran strategis komunikasi dalam menyebarkan kebaikan.

Saran pada penelitian adalah Rekonsiliasi lintas tokoh agama adalah resolusi konflik dalam meredam gejolak sosial yang dapat meluas. Setiap tokoh agama diberikan



ruang dan akses untuk berdialog dengan umatnya secara leluasa, diberikan fasilitas ruang dan tempat untuk kegiatan dialog sampai umat memahami tujuan dialog tersebut.

Optimalisasi peran seluruh elemen masyarakat yang dipimpin MUI bertujuan untuk mengurangi polarisasi umat. Partisipasi masyarakat ini menjadi penting dalam menumbuhkan kepercayaan kepada MUI dan seluruh stakeholder pembangunan di Kota Bekasi.

## REFERENSI

- Andi Faisal., "Communication and Violence: Communicating Human Integrity Characteristics is Necessary for Horizontal Conflict Resolution in Indonesia," *Identity, Culture and Politics* Vol. 9, No. 1 (Juli, 2008): h. 74-114.
- Andi Faisal., "Islam and Modernity: Nurcholish Madjid's Interpretation of Civil Society, Pluralism, Secularization, and Democracy," *Asian Journal of Social Science* 33, no. 3 (January 1, 2005): 486–505, <https://doi.org/10.1163/156853105775013634>.
- Creswell, J. W., Creswell, J. D., Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Fifth edition). SAGE.
- Gill, & Stafford, Roy. *The Media Student's Book*. London and New York: Routledge, Fifth Edition; 2010, h. 330.
- Hamluddin, "HKBP Kembali Ajukan Izin Kebaktian di Ciketing Asem", September 2010. <https://metro.tempo.co/read/278781/hkbp-kembali-ajukan-izin-kebaktian-di-ciketing-asem>
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2017). *Theories of human communication* (Eleventh edition). Waveland Press, Inc.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (200M). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2. ed., [Nachdr.]). Sage.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.6.
- MR Kurnia, "Tabanni Mashalih Al-Ummah", *Al-Wa'ie*, (Februari, 2005), No. 54.
- Priyanda V.M. dkk., "Strategi Pemerintah Kota Bekasi dalam Mengatasi Konflik Sosial: Studi Kasus Bakesbangpolinmas Kota Bekasi", 2013, Universitas Indonesia.
- Sophian, A. R. *Komunikasi Persuasif dan Komunikatif KH. Abdul Wahid Zaini dan Pengembangan Masyarakat*. IAIN Jember. 2020.



Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 246-253.

S.W. Littlejohn, K.A. Foss, John G. Oetzel. *Theories of Human Communication*. United States of America, Waveland Press, 2017.

Williams, Raymond. *Culture and Materialism*. Versobook, UK (2020).

Yin, Robert K. *Case Study Research*. Thousand Oaks, London, 1994  
New Delhi: SAGE Publications.

Yuniarti, T., Saleh, A., Hubeis, M., & Kinseng, R. (2018). Perspective of Online Media towards Settlement Development Case in Bekasi using Agenda Setting Models. *Journal Pekommas*, 3(2), 179. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030207>